

PERCEPAT REALISASI SEKOLAH RAKYAT Kemensos Ajak Kemendikdasmen Kolaborasi

JAKARTA (KR) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos). "Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama, tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat," demikian Mensos Saifullah Yusuf ketika berbincang dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di kantor Kemendikdasmen, kemarin.

Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.

Perintah pembentukan sekolah rakyat, disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1) lalu. Pembentukan Sekolah Rakyat tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. "Kami datang ke sini untuk mempercepat kolaborasi, sehingga sekolah rakyat bisa segera terbangun," ujarnya.



Mensos Saifullah Yusuf bertemu Mendikdasmen Abdul Mu'ti (jas hitam)

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (*boarding school*), sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas, namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

"Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka," kata Gus Ipul.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik ajakan Kemensos. Ia berjanji tidak hanya membantu, namun juga siap berkolaborasi mempercepat realisasi SR. "PPDB yang kita punya sebenarnya untuk membantu

mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada 4, salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri jadi konsepnya itu yang elit dan *alit* (kecil) bisa berkumpul," katanya.

Dengan pembangunan Sekolah Rakyat, anak yang selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri bisa masuk ke SR. Kementerian Pendidikan saat ini juga memiliki relawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Relawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangun sekolah. (Ati)-f

KOMISI X UNDANG MENDIKDASMEN

Raker Bahas UN pada 22 Januari

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, Komisi X menjadwalkan rapat kerja (raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas mengenai Ujian Nasional (UN), Rabu (22/1).

"Tanggal 22 Januari kami akan mengundang Mendikdasmen untuk menjelaskan beberapa hal, termasuk Ujian Nasional," kata Lalu saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (9/1).

Selain membahas mengenai wacana pelaksanaan kembali UN, Komisi X bersama Mendikdasmen juga akan membahas mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan libur sekolah selama Rramadan. "Kami juga akan membahas soal PPDB, kemudian libur sekolah selama puasa, kita akan diskusikan," katanya.

Sebelumnya, Lalu meminta apabila UN kembali diterapkan, Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepatutnya menghadirkan sistem UN yang berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. "Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silakan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," ujarnya.

Menurut Lalu, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian. Lebih lanjut, Lalu menyampaikan, selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit.

Kemudian, dibutuhkan

biaya mahal untuk mencetak soal. Ada pula, katanya melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.

Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurutnya, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percepatan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah. "Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ujarnya.

Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana

digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet dan server yang handal.

"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti," ucapnya.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan. (Ant)-f

MTsN 9 Bantul Juara 1 Lomba Publikasi

BANTUL (KR) - MTsN 9 Bantul meraih juara 1 Lomba Publikasi Kategori Madrasah, yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Tata Usaha Kankemenag Bantul, H Aminuddin SAG MSI kepada Kepala MTsN 9 Bantul, Solichah pada acara Tasyakuran dan Doa Bersama HAB Ke-79 Kemenag RI di halaman Kankemenag Kabupaten Bantul, Rabu (8/1).

Solichah menjelaskan, prestasi ini berkat kerja keras tim Publikasi Tiada Henti (Putih) MTsN 9

Bantul. "MTsN 9 Bantul selama tahun 2024, merilis 2.341 berita di media on-

line, 45 berita di media cetak dan 3.046 publikasi di media sosial yang di-

kelola Tim Putih, seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan Youtube," jelas Solichah.

Menurut Solichah, pada tahun 2024 ada peningkatan dalam hal publikasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi, lanjutnya, menjadi elemen penting dalam membangun citra MTsN 9 Bantul. Dengan publikasi, masyarakat akan mengenal MTsN 9 Bantul dengan baik.

"Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, minat masyarakat terhadap MTsN 9 Bantul semakin meningkat," tutur Solichah. (Fie)-f



Kepala MTsN 9 Bantul, Siti Solichah, menerima penghargaan dari Kepala Tata Usaha Kankemenag Kabupaten Bantul, Aminuddin.

EKONOMI



Istri Wapres, Ny Selvi Gibran Rakabuming Rabu (08/01/2025) membuka Jala Fair 2025 di Balai Samudera Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara. Pameran ini memasarkan produk UMKM lokal. Ny Selvi berpesan kepada seluruh pihak, salah satunya Jalasenastris (organisasi para istri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), untuk terus mendukung kemajuan kedua aspek tersebut agar dapat bersinergi, sehingga meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat dan SDM yang berdaya saing. Dalam gambar istri Wapres melakukan pengguntingan pita yang menjadi penanda Jala Fair, dibuka.

Harga Migor Rakyat Berangsur Turun

JAKARTA (KR) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, harga minyak goreng (migor) rakyat atau Minyak Kita berangsur-angsur turun lantaran pendistribusian sudah berjalan normal.

Budi mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan para distributor Minyak Kita, diketahui, naiknya harga minyak goreng rakyat lantaran adanya libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga rantai distribusi mengalami perlambatan. "Kemarin benar, karena mungkin liburan jadi belum terdistribusi dengan baik. Karena sebagian libur sampai tanggal 6 Januari, sekarang harga sudah mulai normal," ujar Budi ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (10/1).

Berdasarkan pertemuan

tersebut, kata Budi, para pemasok telah melakukan pendistribusian sesuai aturan, yakni dari produsen ke distributor 1 dan diteruskan kepada distributor 2, lalu konsumen.

Menurut Budi, harga Minyak Kita saat ini rata-rata secara nasional berada di angka Rp 17.000 per liter, setelah sebelumnya sempat menginjak di angka Rp 19.000 di wilayah Papua Pegunungan. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyak Kita sebesar Rp 15.700 per liter.

Pada Rabu (8/1), Mendag bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan



Budi Santoso

(Menko Pangan) Zulkifli Hasan melakukan peninjauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Wisata Pabean Sedati di Sidoarjo Jawa Timur. Harga Minyak Kita sendiri berada di angka Rp 15.500 per liter atau lebih rendah dibandingkan dengan HET.

Ia mengatakan, akan terus memantau harga Minyak Kita dan juga barang kebutuhan pokok lainnya

melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau Minyak Kita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

Arief menjelaskan keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga Minyak Kita agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter. Tingginya harga Minyak Kita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur karena rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET Minyak Kita bisa seragam. (Ant)-f

BANK DUNIA DUKUNG PROGRAM AGRARIA Kementerian ATR Terima Rp 5,72 Triliun

JAKARTA (KR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) senilai 353 juta dolar AS atau setara Rp 5,72 triliun dengan kurs rupiah 16.210 per 8 Januari 2025. Pinjaman tersebut untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta mengatakan, secara keseluruhan Bank Dunia memberi pinjaman yang akan berlaku selama lima tahun untuk tiga kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau ATR/BPN mendapat 353 juta dolar AS," kata Nusron ditemui sesuai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemarin.

Nusron menjelaskan, anggaran yang didapatkan tersebut akan difokuskan untuk

mendukung sejumlah program prioritas dari Kementerian ATR/BPN. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan langkah penting untuk pengelolaan ruang dan pembangunan yang lebih terarah.

Selain itu, pinjaman dari bank dunia itu juga digunakan untuk penyusunan peta kadaster yang bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci status dan kepemilikan tanah. Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat juga menjadi bagian dari program yang direncanakan, untuk memastikan hak atas tanah adat dan ulayat tercatat dengan jelas dan sah.

Pemetaan tanah yang belum memiliki peta juga menjadi fokus utama, terutama untuk tapal batas yang berbatasan dengan hutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik batas antara lahan hutan dengan tanah lainnya, sehingga pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. (Ant)-f

DAYA BELI MASYARAKAT TETAP DIJAGA REI DIY Optimis Penjualan Rumah Naik

YOGYA (KR) - Keputusan Pemerintah pembatalan kenaikan PPN 12 persen di luar rumah mewah disambut positif pengusaha anggota Real Estate Indonesia (REI) DPD DIY. Para pengembang perumahan di Yogya optimis penjualan 2025 akan tumbuh 20 persen dibanding tahun 2024 yang sempat turun 10 persen.

"DPD REI DIY masih berharap dukungan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut seperti perpanjangan PPN DTP (PPN Ditanggung

Pemerintah), kemudahan perizinan dan dukungan lainnya terhadap ekosistem perumahan," tutur Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur kepada wartawan, Rabu (8/1) petang di Kantor DPD REI DIY, Timoho, Yogyakarta.

Didampingi jajaran pengurus DPD REI DIY 2024-2027 yang baru saja dilantik, Ilham menegaskan, industri perumahan juga menggerakkan 185 industri terkait sehingga kebijakan pembatalan kenaikan PPN 12

persen ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat di sektor perumahan mengingat situasi ekonomi belum pulih dan penuh tantangan karena eskalasi ekonomi dan politik dunia yang masih rentan.

"Kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk rumah mewah di atas Rp 30 M. Sementara di bawah itu masih tetap 11 persen, seperti segmen properti yang digarap DPD REI DIY," tandasnya.

Selanjutnya mendukung target penjualan 2025, DPD REI DIY siap menggeber pameran *property* bertajuk 'Amazing Property Expo' yang akan digelar 28 Januari-2 Februari 2025 di Pakuwon Mall Yogyakarta.

"Harga tanah tinggi di DIY sehingga pengadaan rumah bersubsidi seharga Rp 160-an juta sulit direalisasikan. Namun kita tetap mengusahakan walau sangat terbatas, mendukung program pemerintah memenuhi kebutuhan rumah disamping penyediaan rumah komersil," tegasnya. (Vin)-f



Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur (dua dari kiri) didampingi jajaran pengurus saat memberikan keterangan pers.